



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.526729/2024**



DS:4907-1590-2954-9735

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
3. Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
4. Kode>Nama Satker : (526729) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
- Sebesar : Rp. 166.300.000 ( SERATUS ENAM PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

		Jumlah Uang
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 166.300.000
005.05.BF.1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 166.300.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	166.300.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PALEMBANG (014) Rp. 166.300.000

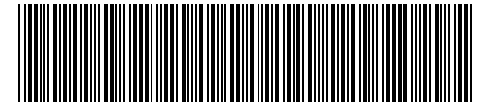
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526729/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4907-1590-2954-9735

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (526729) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

Halaman : I A. 1

Program	:	005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			166.300.000
Kegiatan	:	1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara			166.300.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Layanan Pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		2. 01	Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		3. 01	Jumlah Tenaga Teknis Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		4. 01	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		5. 02	-			
		6. 02	Jumlah Kegiatan Peningkatan Manajemen Pelayanan Peradilan			
		7. 02	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan TUN			
		8. 03	-			
		9. 03	Jumlah Penyelesaian Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1059.AEA	Koordinasi	4,00	kegiatan	70.800.000
Rincian Output	:	01 AEA.002	Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara	3,00	kegiatan	56.000.000
		02 AEA.003	Dukungan Penyelesaian Perkara	1,00	kegiatan	14.800.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1059.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	12,00	orang	95.500.000
Rincian Output	:	01 AEF.002	Sosialisasi/Bimtek Kompetensi Penyelesaian Perkara	12,00	orang	95.500.000

Jakarta, 24 November 2023  
PLT. DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

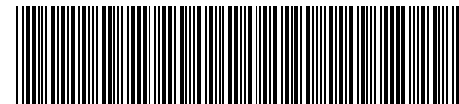
ttd.  
H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H  
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 005.05.2.526729/2024

I B. SUMBER DANA



DS:4907-1590-2954-9735

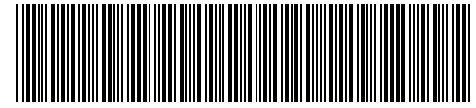
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
 Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
 Kode>Nama Satker : (526729) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

			Pagu		Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	166.300.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	166.300.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0	
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0	
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0	

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526729/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4907-1590-2954-9735

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (526729) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
526729	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang	-	166.300	-	-	-	166.300		
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	166.300	-	-	-	166.300		
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	-	166.300	-	-	-	166.300		
1059.AEA	Koordinasi (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	70.800	-	-	-	70.800	11 . 51	
01	RM	-	70.800	-	-	-	70.800	014	
1059.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	95.500	-	-	-	95.500	11 . 51	
01	RM	-	95.500	-	-	-	95.500	014	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>166.300</b>	-	-	-	<b>166.300</b>		

Jakarta, 24 November 2023  
PLT. DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.  
H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H  
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526729/2024  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4907-1590-2954-9735

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (526729) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	526729	<b>Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	0	0	500	42.500	110.000	500	500	500	1.000	1.500	9.000	300	166.300
		<b>BELANJA BARANG</b>	0	0	500	42.500	110.000	500	500	500	1.000	1.500	9.000	300	166.300
	005.05.BF.1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	0	0	500	42.500	110.000	500	500	500	1.000	1.500	9.000	300	166.300
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	500	42.500	110.000	500	500	500	1.000	1.500	9.000	300	166.300

Jakarta, 24 November 2023  
PLT. DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.  
H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H  
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526729/2024  
IV A. B L O K I R**



DS:4907-1590-2954-9735

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [526729] Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
PLT. DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.  
H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H  
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526729/2024  
IV B. C A T A T A N**



DS:4907-1590-2954-9735

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [526729] Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
PLT. DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.  
H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H  
NIP. 196805231992121002